

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Akbar, Patrialis, 2022. *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika
- Berge J.B.J.M. ten, 1986. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deventer: Kluwer,
- Chaerani, Ayu Dyah. *Analisis Pengaruh Kualitas Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-Negara Berpendapatan Rendah, Menengah, dan Tinggi*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Djatmiati, Tatiek Sri, 2004, "*Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*," Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Hamidi, Jazim *Paradigma Baru Administrasi Publik: Atribusi, Delegasi, dan Mandat*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 145-148.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hans Kelsen. 1945, *General Theory of Law and State*, Russell and Russell, New York,
- Huda. Ni□matul 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

- Kusumaningtyas, Priyambodo, Victoria et al. 2024, "*Akuntansi Sektor Akuntansi Sektor Akuntansi Sektor Publik*, Get Press Indonesia,
- Makarim, Edmon, 2015, *Kompendium Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press,
- Marbun, S.F. 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Pierson, Paul. *Politics in time: History, institutions, and social analysis*. Princeton University Press, 2004
- Siahaan, Maruarar 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara,
- Sukardja, Ahmad, 1995, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Cet. I; Jakarta: UI Press,
- Sobari, Wawan 2024, *Analisis Institusionalisme Baru Dalam Ilmu Politik*, Penerbit Lakeisha,
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Utrecht & Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1990.
- Yos Johan Utama, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

- Anisa, A., & Nawangsari, V. (2025). Pengaruh Digitalisasi Keuangan Daerah Terhadap Layanan Publik Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance

Evi Fitriani, 2026

PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- (GCG) Kota Yogyakarta (Studi Systematics Literature Review). *Jurnal Analisis dan Manajemen Strategis*, 6(3).
- Barus, Zulfadli "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 307-318.
- Santosa, Purbayu Budi "Relevansi dan aplikasi aliran ekonomi kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 9.1 (2008): 46-60.
- Basri, Hasan, and Abdur Rohim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital." *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543* 6.4 (2025): 1042-1050.
- Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.2 (2024): 1498-1506.
- Dedi Komarudin, et al. "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Instrumen Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketahanan Pangan Berkelanjutan." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8.2 (2025): 575-583.
- Parama, Jovial Falah, and Sholahuddin Al-Fatih. "Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.1, 2021, hlm 57-65.
- Istiyanto, Jazi Eko, and Edhy Sutanta. "Model interoperabilitas antar aplikasi e-government." *Jurnal Teknologi Technoscientia* (2012): 137-148.
- Jacoby, Sanford M "Employee attitude surveys in historical perspective. *Industrial Relations: A Journal of Economy and Society* 27.1 (1988): 74-93.

- Janiar, Lady Vironica and Aris Soelistiyo. "Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ilmu EKonomi JIE* 1.3, 2017, hlm. 352-364.
- Khuluq, Anjahul, et al. "Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Pasca Penerapan Single Database Sakti Menggunakan Finite State Automata." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 6.1 (2022): 232-241.
- Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, and Muhammad Hasrul La Aci. "Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat." *Sovereignty* 2.4, 2023, hlm. 354-368.
- Kosandi, Meidi "Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014." *Jurnal Politik* 1.1 (2015): 5
- Muslimin, M. Iksan, et al. "Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Era Digital: Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal Di Indonesia." *Nusantara Hasana Journal* 4.9 (2025): 90-100.
- Malpass, Peter 2011, Path Dependence and the Measurement of Change in Housing Policy. *Housing, Theory and Society*, 28(4), 305– 319.<https://doi.org/10.1080/14036096.2011.554852>
- Marlina, Rika "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1, 2018, hlm. 171-178.
- Nafisah, Mujahidah, et al. "Responsibility Accounting Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Manajemen Modern." *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi* 1.4 (2025): 672-689.
- Nusanto, Irfan Ardyan. "Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4.1 (2021): 53-68.

- Santosa, Purbayu Budi "Relevansi dan aplikasi aliran ekonomi kelembagaan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 9.1 (2008): 46-60.
- Luthan, Salman Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2, 2007. 166-184
- Setiawan, Avi Budi et al. "Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap Kesejahteraan." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 24.2, (2024) 4-6
- Sholikin, M. Nur. "Penataan kelembagaan untuk menjalankan reformasi regulasi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 8.15, 2018, hlm. 79-95.
- Susanto, Sri Nurhari Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal* 3.3. 2020, hlm. 430-441.
- Tamara, Chintia Ayu dan Yunus Tete Konde. "Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan." *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 1.1, 2016, hlm. 1-11.
- Ulya, Zaki "Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Check and Balances." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10.3 (2021): 337-360.

INTERNET / MEDIA MASSA

- Martha Herlinawati Simanjuntak, 2024, Mengakselerasi transformasi digital guna meningkatkan ekonomi RI, <https://www.antaranews.com/berita/4233775/mengakselerasi-transformasi-digital-guna-meningkatkan-ekonomi-ri> di akses pada 22 Agustus 2025
- Audley Thania Teshalonica Siagian, Menuju Transformasi Digital Indonesia – Keamanan Informasi dalam Interoperabilitas dan □Pemangkasan□ Aplikasi Pemerintah <https://digitalsociety.id/2024/05/27/menuju-transformasi-digital->

indonesia-keamanan-informasi-dalam-interoperabilitas-dan-pemangkasan-aplikasi-pemerintah/17702/ di akses pada 29 Oktober 2025

Menkominfo butuh tambahan anggaran Rp20,11 triliun di 2025 untuk transformasi digital, <https://kalteng.antaranews.com/berita/699768/menkominfo-butuh-tambahan-anggaran-rp2011-triliun-di-2025-untuk-transformasi-digital> di akses pada 30 Juni 2025

Abdullah Azwar Anas, Indonesia Naik 13 Peringkat pada UN E-Government Survey 2024, Menteri PANRB: Kolaborasi Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah melalui SPBE , <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-13-peringkat-pada-un-e-governmentsurvey-2024-menteri-panrb-kolaborasi-akselerasi-transformasi-digital-pemerintah-melalui-spbe> di akses pada 29 Agustus 2025

Rini Widyantini. Indeks SPBE Nasional Meningkat, Menteri Rini: Penguatan Integrasi Pelayanan Publik Berbasis Digital, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital?utm_source=chatgpt.com di akses 21 Agustus 2025

UN *E-Government Survey* 2024. (n.d). https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024?utm_source=chatgpt.com

Ariany Kalangi, 2025, Komdigi Raih Peringkat Pertama dalam Evaluasi SPBE 2024, <https://rri.co.id/nasional/1250242/komdigi-raih-peringkat-pertama-dalam-evaluasi-spbe-2024>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Evi Fitriani, 2026

PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI DIGITAL PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 adalah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan